



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Nomor : 1641 TAHUN 2026

Tentang

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PERIODE SEPTEMBER 2026

SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2026/2027

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- Menimbang** : Bahwa untuk menunjang kelancaran pendidikan pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, perlu ditetapkan dosen di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk membimbing skripsi mahasiswa S-1 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang perubahan STAIN Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
4. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2009 tentang Perubahan Nama Universitas Islam Negeri Malang Menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang Menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PERIODE SEPTEMBER 2026 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026 PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**
- Pertama** : Menunjuk dosen sebagaimana terlampir sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa periode September 2026 program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Kedua** : Menugaskan kepada dosen sebagaimana terlampir untuk membimbing skripsi mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana terlampir.
- Ketiga** : Dalam hal penyempurnaan judul, pembuatan proposal dan penyelesaian skripsi, pembimbing diperkenankan merubah judul skripsi asalkan masih dalam satu tema.
- Keempat** : Apabila terjadi ketidaksesuaian bidang keilmuan dan keberatan untuk melaksanakan pembimbingan dimohon untuk mengembalikannya kepada program studi.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku selama satu semester (6 bulan) sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dengan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 14 September 2026



Tembusan Kepada Yth:

1. Para Ketua Program Studi;
2. Kepala Bagian Tata Usaha;
3. Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dekan
Nomor : 1641TAHUN 2026
Tanggal : 14 September 2026
Tentang : Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Periode September 2026 Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

NO	NIM	NAMA	JUDUL YANG DIAJUKAN	DOSEN PEMBIMBING
1	230203110098	MUHAMMAD ANWAR ANDIANTO	SENGKETA SERTIFIKAT GANDA HAK GUNA BANGUNAN DI PTUN SERANG PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH	Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
2	230203110088	ROSALINA CAHYA SAFITRI	IMPLEMENTASI PRINSIP MEANINGFUL PARTICIPATION DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA KASIMAN (STUDI TERHADAP PERATURAN DESA TENTANG RPJMDES TAHUN 2022-2028)	Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M.
3	230203110109	MOH NAUVAL KARIM AL ALAWI	PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH DESA SEBAGAI WUJUD DEMOKRASI DELIBERATIF PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG TENTANG DESA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi di Desa Ngayung, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan)	1. Abdul Kadir, S.Hl., M.H 2. Hakmi Hidayat, M. Pd
4	230203110084	FEBRY AGUS FERDIANSYAH	IMPLEMENTASI KEWENANGAN KETUA PENGADILAN NEGERI DALAM PROSES EKSEKUSI PERDATA PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI LUMAJANG)	Nur Jannani, S.Hl., M.H.
5	230203110044	MOCHAMAD WILDAN QOLBI HABIBI	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DENGAN ANCAMAN: PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	Imam Sukadi, S.H., M.H.
6	230203110017	FAJAR DEWANTARA	NEGARA SEBAGAI WALI TERTINGGI: REKONSTRUKSI DOKTRIN PARESN PATRIAE DALAM MENJAMIN HAK PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR BERDASARKAN CONVENTION ON THE RIGHT OF CHILD	Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M.
7	230203110080	PUNGKY WAHYU FEBRIAN	ANALISIS YURIDIS TERHADAP FRASA KEYAKINAN DAN/ATAU TINDAKAN DALAM PASAL 1 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN MAQASHID SYARIAH	Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.

8	230203110002	MOH IDRIS	POLITIK HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 40/PUU-XXIV/2026 DAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026 TENTANG PEMISAHAN DANA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DAN ANGGARAN PENDIDIKAN PRESPEKTIF SIYASAH MALIYAH	Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
9	230203110015	ALQODHI ADLANTAMA	ANALISIS YURIDIS PEMBENTUKAN UNIVERSITAS REPUBLIK INDONESIA (URI) BERDASARKAN KEPPRES NO. 80/P TAHUN 2026 DITINJAU DARI UU NO. 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI DAN PRINSIP SIYASAH DUSTURIYYAH.	Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
10	230203110019	LAZUARDY ARSYAD HARIS	URGENSI REGULASI SAFETY BY DESIGN PADA PALTFORM GAME ONLINE DALAM UPAYA PENCEGAHAN AFILIASI TERORISME PADA ANAK PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH	Dr. Prayudi Rahmatullah, M.Hl.
11	230203110085	SITI DINA HAMIDAH	PENERAPAN ASAS MUTATIS MUTANDIS DALAM PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PAW ANGGOTA DPR PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM (Studi Putusan Nomor 44/PUU-XXIV/2026 dan 199/PUU-XXIII/2025)	Sheila Kusuma Wardhani Amnesti, S.H., M.H.
12	230203110119	INDINA SA'ADAH	TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS KEGAGALAN SISTEM TUNJANGAN SOSIAL STUDI PERBANDINGAN DTSEN DAN TOESLAGENAFFAIRE PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH	Sheila Kusuma Wardhani Amnesti, S.H., M.H.
13	230203110070	DINAR DANIA AL KAUTSAR	ANALISIS HARMONISASI PENGATUEAN MEKANISME DUE DILIGENCE DALAM REGULATION (EU) 2023/1115 DENGAN PENGATURAN SVLK BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SK.9895/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022	Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
14	230203110087	NAYLA HAMNA MUFRIDA	PRESIDENTIAL BUREAUCRATIC EXPANSION: ANALISIS YURIDIS KECENDERUNGAN PEMBENTUKAN LEMBAGA BARU SEBAGAI INSTRUMEN PERSONALISASI KEKUASAAN EKSEKUTIF	Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.

15	230203110114	DEWI KARTIKA SARI	PROPORSIONALITAS PEMBATASAN HAK POLITIK DALAM PENETAPAN BATAS USIA MINIMAL CALON KEPALA DESA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH NOMOR 186/PUU- XXIV/2026	Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
16	230203110028	MUHAMMAD HANNAN ALI	KETIADAAN NORMA PEMBATAS DELEGASI PENGATURAN RUPIAH DIGITAL KEPADA BANK INDONESIA: ANALISIS KONSTITUSIONAL TERHADAP PASAL 14A AYAT (5) UU P2SK PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH	Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 14 September 2026

